

STRATEGI IFAW (*INTERNATIONAL FUND FOR ANIMAL WELFARE*) MENGHENTIKAN PERBURUAN PAUS KOMERSIAL DI ISLANDIA TAHUN 2010-2017

I Gusti Agung Nanditya Wardhana¹⁾, Putu Ratih Kumala Dewi²⁾, Adi P. Suwecawangsa³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: nandityawardana@gmail.com¹, ratihkumaladewi@unud.ac.id²,
adisuwecawangsa@yahoo.co.id³

ABSTRACT

Uncontrolled whaling is an international issue. This causes a reduction in the world's whale population. Most whale populations in the world are spent by whale hunters. Iceland is a country that still engages in commercial whaling until now even though it has become a member of the IWC. The IWC as a whaling regulation organization is unable to stop commercial whaling by Iceland. This inability led to other international organizations that took part in efforts to stop commercial whaling in Iceland, one of which was IFAW. In an effort to stop whaling commercially in Iceland, IFAW has several strategies. This study aims to find out how the IFAW (International Fund for Animal Welfare) strategy stopped commercial whaling in Iceland in 2010-2017. The concept used in this study refers to the ENGO strategy proposed by Rieteg. This study uses descriptive qualitative methods. The analysis technique used is descriptive qualitative by describing the results of the study in narrative form. The results showed that there were two strategies that IFAW could use in its efforts to stop whaling in Iceland, namely outsider strategy and insider strategy. The outsider strategy was carried out with the Meet Us Don't Eat Us campaign and used international pressure to urge Iceland's commercial whaling policy to be stopped. Meanwhile, the insider strategy was carried out with IFAW's collaboration with local politicians and cooperation with the UK in the IWC meeting to reveal vote buying.

Keyword: IFAW, Insider Strategy, Outsider Strategy, Whaling.

1. PENDAHULUAN

Perburuan paus yang tidak terkendali menjadi isu internasional. Hal ini menyebabkan berkurangnya populasi paus di dunia. Berkurangnya populasi ikan paus memberikan ancaman kepunahan pada ikan paus. Hampir sebagian besar populasi ikan paus di dunia dihabiskan oleh industri perburuan paus. Pada dekade 1930-an, total ikan paus yang ditangkap dalam setahun mencapai 43.000 (WWF, 2005). Untuk mengatasi masalah yang terjadi, Pada tahun 1946 ICRW (*International Convention for the Regulation of Whaling*) diadopsi pertama kali sebagai langkah konservasi dan manajemen

terhadap populasi paus dan kemudian membentuk IWC sebagai organisasi pelaksana administratif (ICRW, 1946).

Perburuan paus mencapai jumlah tertinggi, yakni 66.000 ekor tangkapan pada tahun 1961 (WWF, 2005). IWC pada tahun 1986 memberlakukan moratorium untuk perburuan paus komersial sebagai langkah menghentikan eksploitasi besar-besaran pada populasi paus (Herrera & Hoagland, 2006:261).

Islandia adalah negara yang masih melakukan penangkapan paus komersial hingga kini. Islandia tetap berburu paus meski

menjadi anggota IWC. Hal ini berlangsung karena Islandia memiliki hak khusus atau reservasi dari IWC. Hak khusus tersebut berupa pengecualian Islandia untuk tetap bisa memburu paus meski moratorium masih berlangsung (Altherr, 2003:6-13). Islandia mendapatkan reservasi setelah memenangkan pemungutan suara pada sidang khusus IWC di Cambridge, Inggris (IWC, 2018). Dalam tubuh IWC tidak hanya ada negara yang anti terhadap perburuan paus, tetapi ada pula negara yang mendukungnya. Dukungan dari negara yang pro perburuan paus berhasil memenangkan Islandia mendapatkan reservasi untuk bisa berburu paus.

IWC sebagai organisasi regulasi perburuan paus tidak mampu menghentikan perburuan paus komersial oleh Islandia. Ketidakmampuan ini memunculkan organisasi internasional lain yang turut andil dalam usaha penghentian perburuan paus komersial di Islandia. Organisasi yang turut melakukan perlindungan terhadap populasi paus adalah IFAW (*International Fund for Animal Welfare*). IFAW adalah NGO yang menjunjung tinggi agar kehidupan hewan dihargai dan dilindungi. IFAW berusaha untuk menjamin kesejahteraan hewan pada tataran kebijakan, legislasi, dan masyarakat (IFAW, 2017:2).

IFAW melihat bahwa potensi *whale watching* di Islandia lebih menguntungkan dibandingkan dengan menangkapnya. IFAW telah melakukan usaha untuk mensejahterakan kehidupan paus di perairan Islandia sejak tahun 1990 melalui penelitian

pada potensi *whale watching* (Lindquist & Tryggvadottir, 1990). Pada tahun 2017, *whale watching* sebagai industri wisata di Islandia menghasilkan 20 juta dolar setiap tahun dan menarik 350.000 wisatawan yang mana lebih menguntungkan daripada menangkapnya (IFAW, 2017). Islandia adalah negara yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai pendapatan utama nasionalnya. *Whale watching* ini dinilai sebagai dimensi baru industri pariwisata yang mampu menarik banyak wisatawan. IFAW melihat bahwa *whale watching* adalah langkah yang berkelanjutan untuk memanfaatkan paus dibanding membunuh paus dengan kejam dan tidak manusiawi.

IFAW tidak bisa menghentikan perburuan paus komersial di Islandia secara langsung, akan tetapi IFAW berusaha memengaruhi pengambil kebijakan untuk menghentikannya. Strategi yang dilakukan IFAW telah menurunkan tingkat konsumsi daging paus oleh turis di Islandia dari 40% pada tahun 2009 menjadi 18% pada tahun 2014 dan 1,5% konsumsi lokal pada tahun 2015 (Mansbridge, 2015). Melihat peristiwa yang terjadi, maka untuk itu peneliti ingin melihat strategi IFAW menghentikan perburuan paus di Islandia pada tahun 2010-2017.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang terjadi diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana strategi

IFAW (*International Fund for Animal Welfare*) menghentikan perburuan paus komersial di Islandia pada tahun 2010-2017?”

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi IFAW (*International Fund for Animal Welfare*) dalam usahanya untuk menghentikan perburuan paus komersial di Islandia tahun 2010-2017

2. KAJIAN PUSTAKA

Strategi ENGO (*Environmental Non-Governmental Organization*)

ENGO merupakan turunan dari NGO (*Non-Governmental Organization*) yang fokusnya pada bidang lingkungan. Untuk menggambarkan ENGO harus mengetahui terlebih dahulu mengenai NGO. NGO dapat tergolong sebagai organisasi masyarakat meskipun tidak semua organisasi masyarakat sipil adalah NGO (Lekorwe & Mpabanga, 2007:3). NGO dilihat sebagai gerakan masyarakat yang baru. NGO bergerak sebagai aktor utama penggerak masyarakat dan mempertanyakan akuntabilitas kebijakan yang kemudian mendorong semua kelompok untuk menekan agenda yang mewakili kepentingan masyarakat pada negara

(Hadiwinata, 2003:23-47). NGO memperkuat kedudukannya dengan mengkolaborasikan kelompok perubahan sosial melalui gerakan yang terikat pada norma dan nilai-nilai bersama. Gerakan masyarakat ini adalah aksi kolektif mengimplementasikan nilai-nilai dan kepercayaan untuk mengubah struktur seperti hukum, kebijakan, sistem ekonomi, dan rezim politik. NGO mbingkai isu yang berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut dan kemudian menggerakkan masyarakat untuk merubah struktur yang bertentangan.

Berdasarkan UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*), awalnya terdapat 2 konstituen dari NGO, yakni BINGO (*Business and Industry Nongovernmental Organizations*) dan ENGO (*Environmental Non-Governmental Organizations*). ENGO sendiri adalah jenis NGO yang fokus kepentingannya pada lingkungan (*environment*) dengan melindungi lingkungan pada level lokal, nasional, dan global terhadap ancaman yang dapat merusaknya (Breitmeier & Rittberger, 1997:1). ENGO sebagai agen advokasi bergerak dalam memengaruhi proses

pembuatan kebijakan dan hasil dari proses tersebut.

NGO merupakan konstituen dari NGO yang menggunakan strategi untuk mencapai tujuannya atau kepentingannya. Menurut Rieteg (2011:8) NGO menggunakan 2 strategi untuk mencapai perubahan struktur, yakni melalui strategi *insider* dan *outsider*. Penggunaan strategi tersebut bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan kebijakan melalui kegiatan melobi pihak-pihak terkait agar mendukung tujuan dan jika mungkin mengadopsi tujuan yang ingin dicapai oleh NGO (Weiler & Brandli, 2015:746).

Strategi *insider* adalah aktivitas melobi dengan cara memengaruhi pengambil kebijakan secara langsung dengan pemberian saran, argumen dan analisis dalam lingkungan pengambil kebijakan (Hanegraaff dkk, 2014). Dalam proses pemberian masukan, berlangsung pula proses transfer nilai dan opini dari NGO kepada pengambil kebijakan. Corell & Betsill (2001:87) menekankan kekuatan terbesar NGO dalam memengaruhi pembuat

kebijakan adalah melalui pemaparan informasi dan pengetahuan. Informasi bermain sangat krusial karena para praktisi politik yang turun dalam proses pembuatan kebijakan tidak memiliki cukup waktu dan sumber daya untuk mendapatkannya (Weiler & Brandli, 2015:747).

Rieteg (2011:8-9) menjelaskan bahwa strategi *outsider* adalah aktivitas melobi dengan cara memengaruhi pengambilan keputusan dari luar lingkaran pengambil kebijakan. Strategi ini memengaruhi pengambil kebijakan secara tidak langsung. Taktik dalam strategi *outsider* dapat berupa demo massa, kampanye, pernyataan protes, konferensi publik, serta kerjasama strategis dengan pendukungnya dan media publik. Strategi ini untuk menunjukkan bahwa dukungan kepada NGO dari publik sangat banyak sehingga menyudutkan pengambil kebijakan dalam mengambil kebijakan.

Strategi ini berfokus pada pentingnya gerakan masyarakat untuk melakukan perubahan pada kebijakan negara serta meyakini bahwa negara merupakan sumber

masalah yang harus dibenahi dari luar (Friedman, 1992:6).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggambarkan strategi yang digunakan oleh IFAW untuk menghentikan perburuan paus komersial di Islandia tahun 2010-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat melalui situs IFAW, jurnal, buku, dan portal berita daring.

4. Hasil Dan Pembahasan

Sejarah Perburuan Paus di Islandia

Islandia merupakan negara yang hingga sekarang melakukan perburuan paus. Menurut Altherr (2003) dalam jurnalnya yang berjudul *Iceland Whaling Comeback: Preparation for the Resumption of Whaling*, Islandia telah membunuh 35.195 ekor paus dari tahun 1883. Bagi Islandia, paus memiliki nilai ekonomis sehingga masih melanjutkannya meskipun komunitas internasional menentangnya.

Islandia baru melakukan perburuan paus komersialnya pada tahun 1948 yang kemudian mencabut pelarangan perburuan paus nasional. Islandia bergabung ke dalam IWC (*International Whaling Commission*) setahun setelah Islandia memulai perburuan paus komersial. Hubungan Islandia dengan

IWC berlangsung dengan tidak baik. Terjadi sejarah provokasi, pelanggaran keputusan, penolakan rekomendasi, dan eksploitasi celah yang ada di ICRW untuk bisa mencapai kepentingan Islandia (Altherr, 2003:4). Islandia menggunakan IWC untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Islandia tidak mendukung keberlanjutan spesies paus melalui regulasi dan rekomendasi yang dikeluarkan IWC.

Islandia sebelumnya telah keluar dari IWC tahun Islandia mencoba untuk bergabung kembali ke IWC dan mencantumkan reservasi terhadap moratorium perburuan paus komersial. Meskipun upaya ini ditolak, Islandia akhirnya diterima sebagai anggota IWC pada bulan Oktober 2002 setelah pemungutan suara yang sangat kontroversial. Islandia berhasil bergabung kembali dan mendapatkan reservasi agar terbebas dari moratorium IWC. Pada saat itu, sejumlah besar pihak IWC menegaskan bahwa reservasi Islandia tidak sesuai dengan objek dan tujuan ICRW dan tidak diizinkan di bawah hukum internasional, dengan 16 negara

Perburuan paus komersial masih tetap berlangsung meskipun IWC telah berdiri. Islandia tetap bisa melakukan perburuan paus dengan mengajukan reservasi kepada IWC. IWC sendiri tidak mampu menjadi organisasi internasional yang secara penuh menghentikan perburuan paus komersial melalui penerbitan moratorium perburuan paus komersial tahun 1986. Ketidakmampuan IWC menghentikan

perburuan paus komersial memunculkan celah yang diisi oleh organisasi lain untuk urut peduli akan populasi paus untuk menjaganya. Organisasi tersebut bernama IFAW (*International Fund for Animal Welfare*) yang memiliki tujuan untuk menghentikan perburuan paus komersial.

IFAW Sebagai ENGO Perlindungan Hewan

IFAW adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang lingkungan. IFAW selama hampir 50 tahun telah memberikan kepemimpinan global, inovasi dan bantuan langsung kepada hewan dan komunitas yang membutuhkan. IFAW memiliki visi yang mana hewan harus dihormati dan dilindungi. IFAW memiliki kantor cabang di 15 negara dan proyek di lebih dari 40 negara, menyelamatkan setiap hewan, menjaga populasi, melestarikan habitat, dan mengadvokasikannya untuk masa depan yang lebih baik. IFAW menjanjikan para pembuat kebijakan solusi perlindungan hewan yang efektif yang disampaikan dengan kecerdasan, belas kasih, dan integritas.

Proyek selanjutnya yang dilakukan oleh IFAW adalah penghentian perburuan paus komersial yang masih dilakukan oleh Islandia. Penghentian perburuan paus komersial adalah salah satu prioritas utama IFAW dalam melakukan konservasi. Pandangan IFAW sejalan dengan moratorium perburuan paus yang dikeluarkan IWC. Perburuan paus sudah seharusnya dihentikan

karena mengancam populasi paus jika dilanjutkan. IFAW menawarkan solusi melalui

Analisis Data

Strategi *Outsider*

Kampanye *Meet Us Don't Eat Us*

Islandia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi memudahkan munculnya organisasi masyarakat yang berguna untuk memberikan masukan pada kebijakan yang akan diambil oleh negara. Organisasi masyarakat atau yang disini disebut ENGO banyak bermain proses politik karena adanya keterbukaan pada sistem demokrasi (Hadwinata, 2003:8-9). Sistem demokrasi memberikan ruang yang terbuka bagi ENGO untuk mengadvokasikan kepentingannya. Kekuatan ENGO akan menjadi lebih kuat jika di dukung semakin banyak masyarakat. Mobilisasi publik yang banyak untuk menekan pengambil kebijakan merupakan strategi *outsider* yang bisa memengaruhi pembuat kebijakan.

Usaha yang dilakukan oleh IFAW untuk menghentikan perburuan paus komersial di Islandia dilakukan dengan menggalang banyak massa untuk menekan pemerintah. Aksi publik ini berupa kampanye untuk menarik banyak pendukung untuk menghentikan perburuan paus komersial di Islandia. Kampanye yang dilakukan oleh IFAW ini bernama *Meet Us Don't Eat Us*. IFAW berusaha untuk menarik minat masyarakat untuk melakukan *whale watching* dibandingkan untuk mengkonsumsi paus.

Pendekatan yang dilakukan adalah mengenai kekejaman yang ditimbulkan dari perburuan paus. Perburuan paus merupakan hal yang kejam karena harus menyiksa paus sebelum akhirnya mati. Perburuan paus merupakan tindakan yang berkelanjutan jika dilanjutkan akan menyebabkan kepunahan. Dukungan mengenai perburuan paus harus segera dihentikan. Dukungan publik diperlukan untuk menunjukan kepada pengambil kebijakan di Islandia bahwa terdapat cara yang berkelanjutan untuk memanfaatkan paus, yakni melalui *whale watching*. IFAW menginginkan dukungan yang banyak dari masyarakat lokal dan wisatawan untuk menekan pemerintah segera mengakhiri perburuan paus komersial di Islandia

Pada strategi *outsider*, IFAW menggunakan kekuatan dari publik untuk menekan pengambil kebijakan agar memberlakukan kebijakan yang melindungi kehidupan paus. IFAW menggunakan kampanye *Meet Us Don't Eat Us* untuk mencapai hal tersebut. Kampanye yang dilakukan oleh IFAW bertujuan memperkuat kedudukannya dengan mengkolaborasikan kelompok perubahan sosial melalui gerakan yang terikat pada norma dan nilai-nilai bersama. Nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam masyarakat melalui kampanye ini adalah konservasi dan pemanfaatan paus yang berkelanjutan. Melalui kampanye ini diharap mampu menciptakan gerakan masyarakat yang kolektif mengimplementasikan nilai-nilai dan

kepercayaan untuk mengubah struktur kebijakan perburuan paus komersial yang masih diterapkan Islandia. IFAW bertugas membingkai isu perburuan paus komersial tersebut yang berkontradiksi dengan nilai-nilai konservasi dan kemudian menggerakkan masyarakat untuk merubah struktur yang bertentangan.

IFAW DAN TEKINAN INTERNASIONAL

ENGO menstimulasi berjalannya strategi *outsider* dengan cara pembangunan aliansi nasional dan internasional dalam rangka memperlihatkan legitimasinya dan menekan pemerintah untuk memberikan alternatif kebijakan (Drabek, 1987). Tekanan ini dilakukan dari luar lingkaran pengambilan kebijakan untuk menciptakan kebijakan yang pro terhadap lingkungan. Strategi yang dilakukan oleh ENGO tidak hanya melalui gerakan masyarakat, melainkan juga melakukan aliansi atau kerjasama dengan negara, aktor internasional, elit politik dan lain-lain.

IFAW membangun kerjasama dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam kampanye perlindungan paus. IFAW melihat pihak luar yakni negara dan organisasi internasional sebagai entitas masyarakat internasional yang banyak. Tekanan yang diperoleh oleh Islandia akan sangat banyak untuk menghentikan perburuan paus komersialnya. Mobilisasi digerakkan oleh IFAW agar pihak luar ini mendukung kepentingan untuk perlindungan paus. IFAW

melihat bahwa cara yang tepat untuk berpartisipasi dalam perubahan kebijakan adalah melalui transfer informasi dan nilai dalam melobi pihak luar untuk turut menekan Islandia.

Strategi ini tergolong strategi *outsider* karena IFAW melobi pihak luar menekan Islandia untuk segera menghentikan kebijakan perburuan paus komersialnya. Strategi ini untuk menunjukkan bahwa dukungan kepada ENGO dari publik sangat banyak sehingga menyudutkan pengambil kebijakan dalam mengambil kebijakan (Rieteg, 2011:8-9). IFAW tidak secara langsung melobi pihak pengambil kebijakan di Islandia. IFAW mencari suaka dukungan yang kuat dari luar pihak pengambil kebijakan yang mana memiliki kekuatan politik untuk menekan Islandia.

STRATEGI INSIDER KERJASAMA IFAW DAN POLITISI LOKAL ISLANDIA

IFAW telah bekerja untuk melakukan lobi secara langsung kepada politisi tingkatan kota dan nasional di Islandia. IFAW mengadvokasi politisi tersebut untuk mendukung penghentian perburuan paus komersial di Islandia. Sistem demokrasi membuat terjadinya keterbukaan yang mana membuat IFAW banyak bermain pada proses politik Islandia (Hadwinata, 2003:8-9). Sistem demokrasi memberikan ruang yang terbuka bagi IFAW untuk mengadvokasikan kepentingannya.

Sistem demokrasi memfasilitasi

akses kelompok-kelompok ke pembuat kebijakan yang mana meningkatkan penggunaan strategi *insider*. Penggunaan strategi *insider* dilakukan dengan jalan ikut sebagai delegasi pemerintah dalam konferensi dan memiliki hubungan dekat dengan politisi atau negosiator sebagai penasihat kebijakan ataupun tenaga ahli (Rieteg, 2011:8).

IFAW bisa dengan mudah masuk memengaruhi politik di Islandia karena pengaruh keterbukaan institusi politik dalam sistem demokrasi. Immergut (1992:18-24) menyatakan bahwa akses ENGO atau kelompok kepentingan kepada pembuat kebijakan dibentuk oleh institusi politik. Pembuat kebijakan membangun struktur kelembagaan yang memungkinkan banyak kelompok untuk berpartisipasi. Hal ini karena berbagai kelompok dengan pandangan berbeda menyediakan masukan pada proses pembuatan kebijakan.

IFAW melakukan advokasi kepada politisi di Islandia melalui lobi secara langsung. Strategi ini berhasil meloloskan resolusi mengenai perlindungan paus di Kota Reykjavík pada tahap pertama. IFAW melihat bahwa perburuan paus yang terjadi di Kota Reykjavík mengganggu aktivitas *whale watching* terpadat di Islandia. Perburuan paus akan mengurangi tingkat populasi paus. Perburuan paus yang terus dilakukan kelak akan mengganggu kegiatan wisata *whale watching*, yang mana industri pariwisata adalah pemasukan terbesar Islandia.

IFAW kemudian berhasil melakukan

kontak langsung dengan menteri Perikanan Islandia, yakni Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir disela rapat kabinet yang dihelatnya (Masson, 2017). Pertemuan ini bertujuan untuk melobi usaha untuk menciptakan suaka margasatwa paus di Teluk Faxaflói. IFAW juga selain itu memberikan 100.000 tanda tangan mengenai dukungan masyarakat dan wisatawan untuk menghentikan perburuan paus komersial yang dilakukan oleh Islandia. IFAW terus melakukan advokasi mengenai perlindungan paus pada politisi di Islandia. Hal ini untuk melindungi kehidupan paus pada tataran kebijakan negara yang mengancam populasinya.

IFAW memberikan saran dan argumen kepada Menteri Perikanan melalui nilai-nilai yang dianut oleh IFAW yakni mendukung kesejahteraan paus melalui konservasi. IFAW menginginkan perburuan paus dihentikan karena berargumen metode yang digunakan sangat tidak manusiawi. IFAW juga menyarankan untuk memanfaatkan paus secara berkelanjutan melalui *whale watching*. IFAW melihat bahwa *whale watching* sebagai industri yang menguntungkan bagi Islandia. IFAW melihat industri pariwisata Islandia sebagai pendapatan utama Islandia semakin berkembang karena memunculkan *whale watching* sebagai dimensi pariwisata yang baru.

Kerjasama IFAW Dan Inggris Pada Sidang IWC

IFAW sebagai ENGO memiliki tanggung jawab penting sebagai sumber informasi yang didapatkan melalui serangkaian penelitian. IFAW sebelumnya menemukan indikasi temuan *vote buying* yang digunakan untuk mendukung blok pro perburuan paus di IWC (IFAW, 2012). *Vote buying* adalah sebutan IFAW atas perilaku blok pro perburuan paus di IWC yang membeli suara untuk mendukung kepentingannya. IFAW melihat keanehan berupa perubahan drastis presentase suara negara pro dan kontra terhadap perburuan paus. Informasi ini melihat tujuan sebenarnya perekrutan negara-negara baru di IWC bukan hanya untuk pembukaan kembali dan perluasan penangkapan ikan paus komersial oleh Jepang, Norwegia dan Islandia tapi membenarkan penolakan terhadap manajemen konservasi yang mana menghancurkan moratorium perburuan paus komersial.

Blok pro perburuan paus melakukannya dengan memanipulasi resolusi potensial dengan secara aktif membeli suara dan dukungan dari berbagai negara. Pengumpulan blok pendukung perburuan paus dilakukan guna mengontrol suara mayoritas di pertemuan IWC. Mayoritas suara jika berhasil mencapai $\frac{3}{4}$ bisa melakukan amandemen Schedule sehingga moratorium perburuan paus komersial dapat runtuh.

Vote buying dilakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada delegasi negara sebelum pertemuan IWC dan bantuan

kepada negara-negara berkembang melalui ODA (*Overseas Development Assistance*) untuk mendukung pengembalian perburuan paus komersial di IWC (3MF, 2015:3-11). Manfaat dari program bantuan tersebut telah berkontribusi terhadap peningkatan global dalam jumlah negara yang memahami yang pro terhadap perburuan paus di IWC. Negara-negara tersebut juga dibayar keanggotaannya di IWC. Temuan tersebut didasarkan pada 6 negara dari Karibia pendukung perburuan paus tergolong negara yang kurang berkembang, akan tetapi mampu membayar uang keanggotaan IWC (3MF, 2015:3-11). Biaya keanggotaan yang mahal juga tidak dibarengi dengan kepentingan ekonomi di IWC karena negara ini tidak memiliki sejarah untuk berburu paus. Bahkan beberapa negara yang terkurung daratan, seperti Mongolia, telah bergabung dengan IWC dan mendukung perburuan paus. Suara negara itu digunakan untuk mendukung kembalinya perluasan kegiatan perburuan paus yang dikejar bukan oleh warga negara mereka sendiri tetapi oleh tiga pemburu paus, yakni Jepang, Norwegia dan Islandia.

Kepemilikan akan informasi yang akurat melalui serangkaian penelitian merupakan modal kuat bagi IFAW untuk menjalankan strategi *insider*. Strategi *insider* kemudian dapat terjadi jika IFAW menjalin hubungan yang dekat dengan pemerintah dan elit politik sebagai pihak pengambil kebijakan. IFAW mewujudkan hal tersebut dengan bekerjasama dengan Inggris. IFAW

melihat bahwa Inggris memiliki kekuatan yang besar dalam memimpin IWC (IFAW, 2010). Hal ini dikarenakan Inggris merupakan negara kuat dalam Uni Eropa yang mana semua negara Uni Eropa tergabung dalam IWC. IFAW melihat kekuatan politik yang kuat dari Inggris mampu untuk menarik kepentingan setiap negara agar lebih mendukung perlindungan paus. Kerjasama IFAW dengan Inggris juga didasari dari keinginan kedua belah pihak untuk memperhatikan lingkungan melalui kebijakan yang mendukung keberlanjutan populasi paus (House of Commons, 2007:3-9). IFAW melakukan pendekatan pada level internasional untuk mendukung perlindungan paus. Kebijakan atau kesepakatan internasional memiliki efek implementasi dan kepatuhan yang baik pada objeknya. Kebijakan yang terwujud dari IWC akan memengaruhi kehidupan paus sehingga IFAW harus melakukan strategi *insider* untuk menjaganya.

Kegiatan yang IFAW lakukan tergolong strategi *insider*. Taktik ENGO dalam strategi *insider* dilakukan dengan jalan ikut sebagai delegasi pemerintah dalam konferensi dan memiliki hubungan dekat dengan negosiator sebagai penasihat kebijakan ataupun tenaga ahli (Rieteg, 2011:8). Inggris tidak akan mampu mengungkap kegiatan *vote buying* di IWC tanpa bantuan IFAW sebagai ENGO yang memberikan informasi dan saran untuk mengatasinya. IFAW juga menyediakan informasi bagi Inggris terutama untuk

melawan kecurangan dalam tubuh IWC yang mana akan membuka luas perburuan paus komersial dengan meruntuhkan moratorium. IFAW bertanggungjawab disini sebagai watchdog yang mengawasi setiap kebijakan internasional dan nasional yang bertentang dengan prinsip konservasi paus.

ENGO percaya bahwa cara yang tepat untuk berpartisipasi dalam perubahan kebijakan adalah melalui transfer informasi dan nilai dalam melobi pihak pengambil kebijakan. Nilai-nilai konservasi yang IFAW anut diberikan kepada Inggris karena melihatnya sebagai negara yang memiliki banyak pendukung di Uni Eropa dan dilihat banyak negara sebagai pemimpin untuk menyelesaikan isu tersebut di IWC (IFAW, 2010:12-15). IFAW hanya dilihat sebagai observer dalam sidang IWC. IFAW bukanlah seperti negara yang mampu menentukan pilihan melalui voting dalam perumusan kebijakan dan setting agenda, melainkan IFAW mampu untuk memengaruhi delegasi dalam sebuah konferensi untuk mendukung kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai konservasi IFAW. Proses transfer nilai-nilai terjadi dari IFAW ke Inggris sebagai bentuk gerakan sosial masyarakat untuk mengubah struktur kebijakan yang ada di dalam IWC.

Islandia memulai kembali perburuan paus komersialnya tahun 2006 berkat reservasi yang diajukan pada tahun 2002. Perburuan paus yang dilakukan oleh Islandia tidak bisa dilakukan dengan bebas karena memberlakukan kuota tahunan serta mendapat tekanan internasional akibat

reservasi yang kontroversial tersebut. Jika moratorium ini dibiarkan jatuh berdasarkan $\frac{3}{4}$ suara di IWC, maka Islandia bisa dengan bebas melakukan perburuan paus komersial tanpa perlu memberlakukan kuota yang berkelanjutan. Islandia juga akan terbebas dari tekanan negara luar dan organisasi internasional yang mengatasnamakan ICRW dan moratorium tersebut atas tindakannya dalam memburu paus.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan oleh IFAW guna menghentikan perburuan paus di Islandia melibatkan 2 jenis strategi, yakni strategi *outsider* dan strategi *insider*. Strategi tersebut digunakan sebagai alat untuk mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan oleh IFAW untuk menghentikan perburuan paus komersial di Islandia. Strategi *outsider* dapat berupa demo massa, kampanye, pernyataan protes, serta kerjasama strategis dengan pendukungnya dan media publik. Kekuatan utama dari strategi *outsider* adalah pada kekuatan publik. Selain strategi *outsider*, IFAW juga menggunakan strategi *insider*. Strategi ini dilakukan dengan memengaruhi proses pengambilan kebijakan melalui kegiatan melobi pihak-pihak terkait agar mendukung tujuan dan jika mungkin mengadopsi tujuan yang ingin dicapai oleh IFAW. Kekuatan terbesar strategi *insider* adalah pengetahuan

dan informasi yang digunakan IFAW untuk melobi.

Bentuk strategi *outsider* yang dilakukan IFAW dalam usahanya menghentikan perburuan paus, diantaranya adalah melakukan Kampanye Meet Us Don't Eat Us serta membangun kerjasama dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini dilakukan IFAW untuk mengadvokasi publik agar mendukung perlindungan paus di Islandia. IFAW memberikan nilai-nilai yang dianut untuk memengaruhi pihak tersebut agar mendukung program IFAW dalam menghentikan perburuan paus komersial Islandia. Kegiatan melobi pihak luar dilakukan untuk menekan Islandia agar menghentikan kebijakan perburuan paus komersialnya. Strategi ini untuk menunjukkan bahwa dukungan kepada ENGO dari publik sangat banyak sehingga menyudutkan pengambil kebijakan dalam mengambil kebijakan. IFAW disini bertanggung jawab sebagai *pressure group*. ENGO sebagai *pressure group* dengan memaksa atau menekan Islandia untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada.

Berbeda dengan strategi *outsider*, tindakan yang dilakukan oleh IFAW dalam strategi *insider*-nya adalah dengan melobi politisi lokal Islandia serta membangun kerjasama dengan Inggris dalam sidang IWC. Pada strategi *insider* yang dilakukan oleh IFAW yakni melakukan tindakan melobi politisi lokal Islandia, IFAW bertindak mengadvokasi politisi lokal agar mengutamakan nilai-nilai kesejahteraan hewan ke dalam undang-

undang dan kebijakan lain pada level nasional di Islandia.

Strategi *insider* yang dilakukan oleh IFAW lainnya adalah dengan membangun kerjasama dengan Inggris dalam sidang IWC untuk mengungkap *vote buying*. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai suatu tindakan dari strategi *insider* dikarenakan IFAW melobi Inggris sebagai pihak pengambil kebijakan dalam sidang IWC yang mana hasilnya akan memengaruhi kebijakan nasional Islandia. IFAW melihat bahwa Inggris memiliki kekuatan yang besar dalam memimpin IWC. IFAW melihat kekuatan politik yang kuat dari Inggris mampu untuk menarik kepentingan setiap negara agar lebih mendukung perlindungan paus.

6. Daftar Pustaka

- WWF. 2005. *The History of Whaling and the International Whaling Commission (IWC)*. (Online) <http://wwf.panda.org/?13796/The-History-of-Whaling-and-the-International-Whaling-Commission-IWC> (diakses pada 3 Mei 2018)
- International Convention for the Regulation of Whaling. 1946.
- Herrera, G & Hoagland, P. 2006. *Commercial Whaling, Tourism, and Boycotts: An Economic Perspective*. Marine Policy 30. Amsterdam: Elsevier.
- Altherr, S. 2003. *Iceland Whaling's Comeback: Preparation for the Resumption of Whaling*. Munich: Pro Wildlife. (Online) https://uk.whales.org/sites/default/files/islands_walfang_comeback.pdf (diakses pada 20 Juli 2018)
- IWC. 2018. *Iceland and Commercial Whaling*. (Online) <https://iwc.int/iceland> (diakses pada 2 Mei 2018)

- Lindquist, O & Tryggvadottir, M. 1990. *Whale-watching in Iceland: feasibility study*. Akureyri: Universitas Akureyri.
- IFAW. 2017. *Political Advocacy At The National Level*. (Online) <https://www.ifaw.org/united-states/our-work/political-advocacy/political-advocacy-national-level> (diakses pada 22 September 2018)
- IFAW. 2017. *Annual Report July 2015 - July 2016*. (Online) https://s3.amazonaws.com/ifawpantheon/sites/default/files/legacy/IFAW_AnnualReport16_US_LR.pdf (diakses pada 2 Mei 2018)
- Mansbridge, P. 2015. *Focusing on whale watching in Iceland*. (Online) <https://www.ifaw.org/united-kingdom/news/focusing-whale-watching-iceland> (diakses pada 3 Mei 2018)
- Hadiwinata, B. S. 2003. *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Management Movement*. Taylor & Francis Routeledge.
- Lekorwe, M. & Mpabanga, D. 2007. *Managing Non-Governmental Organizations in Botswana*. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal 12 (3). Berlin: Research Gate.
- Breitmeir, H. & Rittberger, V. 1997. *Environmental NGOs in an Emerging Global Civil Society*. Center for International Relations/Peace and Conflict Studies. Tubingen: Institut Ilmu Politik.
- Rieteg, K. 2011. *Public pressure versus lobbying – how do Environmental NGOs matter most in climate negotiations?* London: The Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment.
- Friedmann, J. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Oxford: Blackwell.
- Hanegraaff, M. Bruycker, I. & Beyers, I. 2014. *Going Public or Staying inside? Lobbying strategies at Global Conferences*. (Online) <http://stukroodvlees.nl/wp-content/uploads/2014/12/Hanegraaff-De-Bruycker-Beyers.pdf> (diakses pada 1 Mei 2018)
- Corell, E. & Betsill, M. 2001. *A Comparative Look at NGO Influence in International Environmental Negotiations*. Global Environmental Politics 1 (4). Boston: Institut Teknologi Massachusetts
- Weiler, F. & Brandli, M. 2015. *Inside Versus Outside Lobbying: How The Institutional Framework Shapes the Lobbying Behaviour of Interest Groups*. European Journal of Political Research 54. Essex: European Consortium for Political Research Press.
- Drabek, A. 1987. *Development alternatives: The challenge for NGOs—an overview of the issues*. World Development 15. Inggris Raya: Pergamon Journals Ltd.
- Immergut, E. (1992). *Health politics: interests and institutions in Western Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Masson, S. 2017. *Fishery minister says she's open to changes in whaling policy*. (Online) <https://www.ifaw.org/united-states/news/fishery-minister-says-she%E2%80%99s-open-changes-whaling-policy> (diakses pada 4 Mei 2018)
- IFAW. 2012. *Protecting Animals In Your Community*. (Online) <https://www.ifaw.org/united-states/our-work/political-advocacy/protecting-animals-your-community> (diakses pada 22 September 2018)
- IFAW. 2010. *Animal Welfare Manifesto*. London: Seven Print Ltd. (online) <http://www.politicsresources.net/area/uk/ge10/man/groups/IFAW.pdf> (diakses pada 30 April 2018)
- House of Commons. 2007. *Trade, Development and Environment: The Role of the FCO*. London: The Stationery Office Limited.
- 3MF. 2005. *Japan's "Vote Consolidation" in International Whaling Commission*. 3rd Millenium Foundation.